

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi subjek yang unggul, bermutu dan profesional dalam masing-masing bidangnya diperlukan perwujudan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap pendidikan. Sementara dalam hal ini pengertian dasar pendidikan adalah proses menjadikan seseorang untuk menjadikan dirinya sendiri agar tumbuh sejalan beriringan dengan hati nurani, kemampuan, watak dan bakat mereka masing-masing secara utuh. Pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk mencetak kemampuan dan karakter peserta didik yang harus sama seperti gurunya. Suatu proses dalam pendidikan lebih diarahkan kepada berfungsinya potensi siswa secara manusiawi yang mana itu ditujukan agar para siswa mampu menjadi dirinya sendiri dan memiliki kemampuan serta kepribadian yang unggul.¹

Peran yang sangat strategis dalam pendidikan harus dimiliki, karena dalam hal ini pendidikan adalah penentu kualitas sumber daya manusia. Dalam melakukan peran tersebut tenaga kependidikan haruslah terlibat. Tenaga pendidik dalam hal ini memiliki peran yaitu guna pembentukan

¹ Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011), 2.

ketrampilan, pengetahuan serta karakter para peserta didik. Maka dari itu, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik haruslah profesional agar menjadi tenaga pendidik yang profesional. Tercapainya suatu tujuan dalam pendidikan ini tergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan setiap kepala sekolah. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah.² Kepala sekolah yakni pejabat profesional yang berada dalam suatu organisasi sekolah, yang mana tugasnya adalah untuk mengatur sumber daya sekolah serta bekerjasama dengan para guru, staf, dan pegawai yang lainnya dalam mendidik peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dari pendidikan itu.³

Pendidikan saat ini merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia yang menitikberatkan pada proses pembelajaran. Yang mana suatu proses pembelajaran tersebut bertujuan untuk menjadi manusia seutuhnya setelah mendapatkan bekal dari berbagai pengetahuan dan keilmuan yang menjadikan pada perubahan pemikiran, kepribadian, watak serta perilaku ke arah yang lebih baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

² Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu...*, 116.

³ Euis Karwati dan Doni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesional Kepala Sekolah*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 82.

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

Masalah yang dialami oleh pendidikan nasional saat ini adalah keterbatasan anggaran, peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan serta belum tercukupinya sumber daya dari masyarakat yang sesuai dengan prinsip pendidikan yakni sebagai tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah.⁵

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan mutu pendidikan yang selama ini masih kurang berhasil. *Pertama*, pembangunan yang strateginya memang kurang, karena strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih condong pada sifat *input oriented*. Strategi yang seperti itu lebih menekankan kepada anggapan bahwa jika semua input pendidikan telah terpenuhi maka akan menghasilkan output yang bermutu. Namun pada kenyataannya strategi input – output ini hanya terjadi dan berfungsi dalam instiusi ekonomi, dan tidak terlalu berfungsi di lembaga pendidikan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*. Akibatnya, banyak faktor yang bercermin pada tingkat makro namun tidak bisa berjalan seperti pada umumnya di tingkat mikro (madrasah). Akhirnya hal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa dalam pembangunan pendidikan harus lebih memperhatikan pada faktor proses pendidikan, dan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan. Input pendidikan adalah hal mutlak

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5.

⁵ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000), 78.

yang harus ada dalam batas tertentu, namun hal tersebut belum tentu menjamin 100% dapat meningkatkan mutu pendidikan.⁶

Menurut Deming, mutu merupakan keserasian dengan pasar, sedangkan menurut Juran, mutu ialah kecocokan dengan suatu produk. Di sisi lain Crosby juga berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian dengan yang diisyaratkan, dan Husaini Usman mengartikan mutu itu adalah suatu tingkat keunggulan.⁷

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa mutu adalah keinginan yang dicapai oleh pelanggan. Jika dikaitkan dengan pendidikan maka memerlukan usaha yang benar-benar dan pantang menyerah demi tercapainya keberhasilan dan kemajuan dalam pendidikan.

Mutu pendidikan bisa tercapai sesuai harapan yang diinginkan dengan cara semua warga sekolah serta semua elemen madrasah harus ikut terlibat dalam peningkatan mutu suatu pendidikan tersebut. Karena meskipun kepala sekolah memiliki visi dan misi yang bertujuan maju ke depan jika tidak diimbangi oleh komitmen semua anggota sekolah maka akan percuma, dan program itu hanya akan sekedar program yang tidak bisa berjalan. Terlebih lagi saat ini persaingan dunia pendidikan sangatlah ketat sehingga diperlukan inovasi-inovasi yang baru serta kemompakkan dari warga sekolah agar mampu bersaing dengan sekolah lain.

⁶ Sofan Amri, *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah dalam Teori Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2013), 286.

⁷ Sofan Amri, *Peningkatan Mutu...*, 17.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu lebih mengacu kepada proses dan hasil pendidikan. Dalam berproses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input seperti halnya bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana, prasarana dan penciptaan suasana yang nyaman dan kondusif. Guna menyesuaikan berbagai input atau mensinergikan banyak komponen dalam proses belajar mengajar diperlukan suatu manajemen sekolah serta dukungan sekolah baik antara siswa, guru dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas. Mutu dalam konteks hasil pendidikan lebih mengarah kepada prestasi yang diperoleh oleh sekolah dalam setiap kurun waktu tertentu, yang dibuktikan dengan status akreditasi. Prestasi yang diraih bisa berupa tes, maupun kemampuan akademis. Selain itu bisa juga suatu hal yang dicapai pada bidang di luar sekolah seperti halnya cabang olahraga, drum band, pramuka atau keterampilan yang lainnya. Bahkan prestasi sekolah tidak hanya terlihat dari bidang sekolah maupun luar sekolah namun bisa juga berupa kondisi yang nyaman, disiplin, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, serta sopan santun.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan yang namanya suatu pembiayaan karena untuk peningkatan mutu tidak bisa terlepas dari pembiayaan.

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka harus diadakan yang namanya pengelolaan pembiayaan sebaik dan serapi mungkin. Biaya memang bukan satu-satunya faktor yang dapat menentukan keberhasilan pendidikan akan tetapi dengan biaya yang tinggi diharapkan mutu pendidikan bisa

semakin meningkat. Namun ada juga beberapa lembaga yang bisa meningkatkan mutu pendidikannya dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Semua itu tergantung pada bagaimana strategi manajemen pembiayaan yang dijalankan oleh sekolah. Dari skian banyak sumber daya pendidikan yang dianggap penting yaitu adalah uang. Ada yang mengibaratkan jika pendidikan itu gerobak dan uang itu adalah kudanya. Maka gerobak tidak akan bisa berjalan jika tidak ditarik oleh kuda. Tanpa uang pendidikan ini tidak akan berjalan. Maka bisa dikatakan bahwa uang merupakan sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karenanya untuk tercapainya suatu pencapaian pada pendidikan maka uang perlu dikelola dengan efektif dan efisien.⁸

Jika diinginkan sebuah madrasah yang berkualitas maka biaya pendidikan bisa diasumsikan sangat mahal karena jika menginginkan hal tersebut maka harus didukung dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan profesionalisme serta fasilitas yang lengkap. Hal ini akan terwujud jika ditopang dengan biaya yang memadai, karena hal tersebut dapat menipang proses belajar mengajar yang maksimal dengan harapan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.⁹

Permasalahan mendasar pada manajemen pembiayaan yang biasanya terjadi adalah bagaimana sebuah lembaga mampu merencanakan, mengorganisasikan, merealisasikan serta mengawasi pembiayaan pendidikan agar sekolah mampu berjalan sesuai yang diinginkan dan mampu

⁸ Abu Bakar, Manajemen Keuangan, (Bandung:Alfabrta, 2014), 255.

⁹ Kisbiyanto, Pengefektifan Manajemen Pendidikan dalam jurnal *Elementary* Vol 2 No. 1 (2014), 144.

menghasilkn lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan yang lainnya dari seklah-sekolah lain.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa. Semua setuju bahwa pendidikan adalah penting bagi terciptanya kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Karena pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang, pemerintah RI sejak tahun 2009, memiliki kebijakan yang tegas dan berani untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, berpengetahuan, bermartabat dan mempunyai daya saing tinggi dalam bidang pendidikan, hasilnya adalah hampir setiap tahun Indonesia merupakan langganan juara olimpiade sains, penelitian ilmiah remaja, dan matematika di ajang internasional.

Agar pemerataan pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat maka pemerintah telah menyadari dengan ditingkatkannya biaya operasional siswa dengan cara seperti pemberian kartu pintar dan juga beasiswa. Karena pemerintah menyadari bahwa pendidikan sangatlah penting terlebih lagi di zaman yang serba teknologi canggih.

Maka dari itu pemerintah secara terus menerus telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal ini untuk memerjelas tentang pendidikan gratis di jenjang pendidikan yang bermutu yang dicanangkan pemerintah agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman. Biaya

pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi berhasilnya penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan biaya yang memadai.

Jika ditinjau dari segi ekonomi maka biaya sangat diperlukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan. Karena dalam hal ini tidak mungkin jika tidak ada kegiatan pendidikan yang tidak memerlukan biaya sama sekali, pasti semuanya membutuhkan biaya, terlebih lagi jika tuntutan kualitasnya semakin tinggi maka biaya yang diperlukan juga akan sangat tinggi.¹⁰

Manajemen pembiayaan dalam perspektif persekolahan, dengan merujuk pada pemikiran G. R. Terry dalam Daryanto, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) biasa disingkat POAC.¹¹

Dalam peningkatan kualitas pendidikan itu bukanlah tugas yang ringan, karena di dalamnya terdapat persoalan yang kompleks, yang mana nantinya akan menyangkut perencanaan, pendanaan serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem sekolah.¹² Guna mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi luhur dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berkompetisi dalam

¹⁰ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan...*, 23.

¹¹ Daryanto, M. Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2013), 161.

¹² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung:Rosdakarya, 2007), 20.

persaingan global dalam hal ini lembaga pendidikanlah yang memiliki tanggung jawab dengan meningkatkan mutu pendidikan.

Kelancaran penyelenggaraan pendidikan tergantung pada pengucuran anggaran dari pemerintah. Karena agar pembiayaan berjalan dengan baik maka pemerintah telah mengatur standar pembiayaannya. Negara telah menetapkan dan memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.¹³

Dari beberapa uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa untuk melancarkan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan maka diperlukan yang namanya manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan yang serasi akan menentukan pencapaian tujuan pendidikan, yakni terwujudnya sekolah yang maju dan berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuannya maupun spiritual.

Pembiayaan diperlukan dalam proses pendidikan oleh karena itu diperlukan sebuah penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang sesuai agar kegiatan sekolah yang telah diprogramkan bisa berjalan sesuai yang diharapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menanggapi masukan dari masyarakat yang menganggap pendidikan penting maka MTs Al-

¹³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31, ayat 3.

HikmahPlandaan Jombang ikut membangun kemajuan pendidikan berbagai macam tawaran program dengan tanpa biaya maupun dengan biaya.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan penggunaan dana yang digunakan dalam pembiayaan program yang dijalankan, MTs Al-Hikmah menggunakan indikator penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan, penyerapan anggaran serta kelancaran proses pembelajaran, prestasi siswa diberbagai bidang, prestasi sekolah baik akademis maupun nonakademis, dan dukungan dari berbagai pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin menggali informasi dan meneliti yang berkenaan dengan manajemen pembiayaan guna meningkatkan mutu pendidikan di MTs Al-Hikmah Plandaan Jombang.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen pembiayaan pada MTs Al-Hikmah Plandaan Jombang?
2. Bagaimana pelaksanaan peningkatan mutu dengan manajemen pembiayaan di MTs Al-Hikmah Plandaan Jombang?
3. Bagaimana pengawasan peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen pembiayaan di MTs Al-HikmahPlandaan Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perencanaan peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen pembiayaan pada MTs Al-Hikmah Plandaan Jombang

2. Untuk menganalisis pelaksanaan peningkatan mutu dengan manajemen pembiayaan di MTs Al-Hikmah Plandaan Jombang
3. Untuk menganalisis pengawasan peningkatan mutu pendidikan dg manajemen pembiayaan di MTs Al-HikmahPlandaan Jombang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pendidikan dan manajemen pendidikan.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan pendidikan tentang manajemen pembiayaan.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi institusi pendidikan.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas penelitian

No.	Nama dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Faijin (2017) Tesis STAIN Kudus	Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di MTs Maslakul Huda Sluke)	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan pendidikan	<p>1. Penelitian ini memfokuskan pada masalah perencanaan pembiayaan pendidikan</p> <p>2. Penelitian ini memfokuskan pada masalah pengelolaan pembiayaan pendidikan</p> <p>3. Penelitian ini memfokuskan pada masalah pelaksanaan pembiayaan pendidikan</p>	Penelitian ini lebih memfokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan

				4. Obyek penelitian ini berada di MTs Maslakul Huda Sluke	
2	Heru Prasetya (2012) Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pengelolaan Keuangan Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Surakarta	Sama-sama meneliti tentang keuangan di sekolah	1. Penelitian ini memfokuskan pada masalah karakteristik perencanaan dan alokasi dana di Sekolah 2. Penelitian ini memfokuskan pada masalah pencatatan dan pertanggung jawaban keuangan di Sekolah 3. Obyek penelitian di	Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan keuangan sekolah

				Sekolah Dasar Negeri Karangasem 2 Laweyan Surakarta	
3	H. Majeri (2016) Tesis IAIN Palangkaraya	Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat/ Orang Tua Studi pada Mts Darul Ulum Palangkaraya	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan pendidikan	1. Penelitian ini memfokuskan pada masalah sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat 2. Penelitian ini memfokuskan pada masalah Perencanaan (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah) RABM	Penelitian ini lebih memfokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat/orang tua

				<p>3. Penelitian ini memfokuskan pada masalah realisasi dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua</p> <p>4. Penelitian ini memfokuskan pada masalah laporan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua</p> <p>5. Obyek penelitian ini di MTs</p>	
--	--	--	--	---	--

				Darul Ulum Palangkaraya	
--	--	--	--	----------------------------	--

Dari penelitian-penelitian di atas dapat dilihat bahwa penelitian tersebut lebih memfokuskan pada masalah pengelolaan pembiayaan atau keuangan, serta ketransparanan pengelolaan keuangan saja dan belum menyinggung sama sekali pada peningkatan mutu pendidikan.

Dalam hal ini peneliti lebih ingin memfokuskan cara peningkatan kualitas pendidikan hingga bisa menjadikan madrasah yang unggul serta berprestasi. Peneliti ingin mengetahui strategi manajemen pembiayaan yang dijalankan oleh madrasah dalam mengelola dan mengatur lembaganya sehingga mampu meraih madrasah yang unggul dan berprestasi.

F. Definisi Istilah

1. Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007, Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; tempat yang baik menurut siasat perang.

2. Manajemen pembiayaan adalah manajemen terhadap fungsi- fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam bidang tertentu. Manajemen pembiayaan juga berarti proses melakukan kegiatan mengatur pembiayaan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dikenal dengan POAC dimulai dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling).¹⁴

3. Mutu Pendidikan menurut Mujamil adalah “Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin”.¹⁵ mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekati diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan.

4. Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan pembiayaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi 1) penetapan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, 2) penetapan pedoman dasar, 3) penetapan mekanisme pengambilan keputusan dan rencana organisasi, dan 4) penetapan sumber daya pendukung 5) penetapan prosedur pengawasan.

¹⁴ Daryanto, M. Farid, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Yogyakarta: GavaMedia, 2013), 161-162.

¹⁵ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*. (Jakarta: Airlangga, 2007), 206

5. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan Pembiayaan yang diusulkan dalam penelitian ini meliputi: 1) perencanaan biaya, 2) penetapan biaya, 3) alokasi biaya, dan 4) penyelesaian pembiayaan.

6. Evaluasi Pembiayaan

Evaluasi/pengawasan Pembiayaan adalah penilaian pembiayaan yang dilakukan untuk mengetahui segala kekurangan kegiatan sebelumnya untuk dilakukan tindakan korektif dalam pelaksanaan program selanjutnya. Evaluasi pembiayaan dapat dilihat melalui kegiatan-kegiatan meliputi: 1) pengawasan rencana pembiayaan yaitu sudahkah dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan yang sudah dibuat sebelumnya atau tidak, 2) pengawasan selama proses pelaksanaan pembiayaan yaitu apakah pembukuan sudah dilakukan dengan baik atau belum, 3) pengawasan informasi yaitu berupa pelaporan keuangan, 4) pemeriksaan anggaran, 5) pemeriksaan dalam pembayaran, dan 6) pelaporan.

